

DIKOTOMI PENDIDIKAN DI INDONESIA: ANTARA SEKOLAH UMUM DAN MADRASAH

Abdullah Aufa Nadhif^{1*}, Aulia Arsinta², Achmad Rasyid Ridha³

^{1,2,3}Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Indonesia

* Corresponding Email: aufanadhif36@gmail.com

ABSTRAK

Dikotomi pendidikan di Indonesia, yang memisahkan sistem sekolah umum dan madrasah, berakar pada warisan kolonial Belanda dan isu-isu kompleks lainnya. Makalah ini mengkaji permasalahan mendasar ini, termasuk sejarah terbentuknya, isu-isu yang muncul, dampak yang ditimbulkan, dan solusi yang diusulkan. Secara etimologis, "dikotomi" berarti pembagian menjadi dua bagian, dan dalam konteks pendidikan di Indonesia, ini mengacu pada pemisahan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Pemisahan ini memengaruhi aspek administratif, kebijakan, kualitas, persepsi masyarakat, pendanaan, dan akses sumber daya pendidikan. Dikotomi ini telah menyebabkan kesenjangan kompetensi, diskriminasi lulusan, serta menghasilkan ilmuwan yang kurang bertanggung jawab dan ahli agama yang kurang peka sosial. Dampak lainnya termasuk perpecahan sistem dan kebijakan yang tidak selaras, kesenjangan pendanaan dan kesejahteraan guru, tantangan dalam penerimaan peserta didik baru, dan kesenjangan sosial. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi dikotomi ini melalui berbagai regulasi dan penyetaraan, dualisme sistem pendidikan masih dipertahankan, seringkali mengarah pada diskriminasi pendanaan dan kesejahteraan guru. Untuk mengatasi masalah ini secara fundamental, makalah ini menyarankan pendekatan holistik dan terintegrasi, meliputi revisi kurikulum yang menggabungkan ilmu umum dan agama, pelatihan guru yang komprehensif, peningkatan fasilitas pendidikan, serta kampanye kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat.

Kata Kunci : dikotomi, integrasi, pendidikan

ABSTRACT

The dichotomy of education in Indonesia, which separates the public school system and the madrasah, is rooted in the legacy of Dutch colonialism and other complex issues. This paper examines this fundamental problem, including its history, emerging issues, impacts, and proposed solutions. Etymologically, "dichotomy" means division into two parts, and in the context of education in Indonesia, it refers to the separation of Islamic religious education and general education. This separation affects administrative aspects, policies, quality, public perception, funding, and access to educational resources. This dichotomy has led to competency gaps, discrimination against graduates, and produced less responsible scientists and religious scholars who are less socially sensitive. Other impacts include a split system and inconsistency of policies, gaps in teacher funding and welfare, challenges in accepting new students, and social disparities. Although the government has attempted to address this dichotomy through various regulations and equalization, the dualism of the education system is still maintained, often leading to discrimination in teacher funding and welfare. To fundamentally address this problem, this paper suggests a holistic and integrated approach, including curriculum revision that combines general

and religious knowledge, comprehensive teacher training, improvement of educational facilities, and awareness campaigns to change public perceptions.

Keywords : *dichotomy, integration, education*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa, dengan potensi mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta memiliki karakter kebangsaan dan spiritualitas yang kuat. Di Indonesia, sistem pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan pembaruan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, di balik upaya tersebut, masih terdapat persoalan struktural dan historis yang belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu isu fundamental yang masih menjadi perhatian hingga kini adalah dikotomi pendidikan, yaitu pemisahan antara sistem pendidikan umum (sekolah) dan pendidikan Islam (madrasah).

Fenomena ini berakar dari masa kolonial Belanda, ketika sistem pendidikan Barat diperkenalkan dengan tujuan mendukung kepentingan kolonial, sementara pendidikan Islam berjalan secara mandiri dan tidak mendapatkan pengakuan atau dukungan negara. Azyumardi Azra (1999) menyatakan bahwa "dikotomi pendidikan di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda, ketika sistem pendidikan Barat diperkenalkan untuk mendukung kepentingan kolonial, sementara pendidikan Islam tetap berjalan secara tradisional dan tidak memperoleh dukungan negara. Hingga kini, dikotomi itu masih berlanjut dalam bentuk pemisahan antara sistem pendidikan nasional (sekolah umum) dan sistem pendidikan Islam (madrasah), meskipun ada upaya integrasi melalui kebijakan seperti UU Sisdiknas 2003".

Dikotomi pendidikan merujuk pada pemisahan atau perbedaan yang tajam antara dua sistem pendidikan yang seharusnya dapat berjalan secara sinergis. Dalam konteks Indonesia, dikotomi ini tercermin dalam perbedaan sistemik antara lembaga pendidikan berbasis umum (sekolah) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan (madrasah) yang berada di bawah Kementerian Agama. Pemisahan ini tidak hanya memengaruhi aspek administratif dan kebijakan, tetapi juga berdampak pada kualitas, persepsi masyarakat, pendanaan, serta akses terhadap sumber daya pendidikan.

Pendidikan sekuler yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda lebih mendapatkan perhatian negara dibandingkan pendidikan tradisional berbasis agama Islam seperti pesantren dan madrasah. Akibatnya, hingga kini masih terdapat persepsi bahwa sekolah umum lebih modern dan memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan madrasah, meskipun banyak madrasah telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang setara atau bahkan lebih baik dari sekolah umum. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini akan mengkaji lebih dalam isu dikotomi pendidikan antara madrasah dan sekolah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta strategi penyelesaian yang dapat ditempuh untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang setara, adil, dan terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan dengan dikotomi pendidikan di Indonesia, antara sekolah umum dan madrasah. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Langkah-langkah penelitian ini meliputi:

Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi isu-isu pokok terkait dikotomi pendidikan di Indonesia, termasuk pengertian, sejarah, isu-isu terkini, dampak, serta upaya penanganannya.

Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian literatur difokuskan pada karya-karya akademis dan publikasi yang membahas sejarah pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan Islam, serta perbandingan antara sistem pendidikan umum dan madrasah.

Analisis Data: Menganalisis data yang terkumpul secara deskriptif-kualitatif. Proses analisis melibatkan interpretasi dan sintesis informasi untuk memahami akar permasalahan dikotomi pendidikan, dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional, serta solusi yang ditawarkan. Analisis juga mencakup perbandingan pandangan para ahli mengenai isu ini.

Penyusunan Makalah: Menyusun hasil analisis ke dalam format makalah jurnal ilmiah dengan sistematika yang terstruktur, meliputi pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran.

Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dikotomi pendidikan di Indonesia, serta kontribusi terhadap perumusan langkah-langkah strategis menuju integrasi dan pemerataan kualitas pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dikotomi Pendidikan

Dikotomi pendidikan merupakan kondisi di Indonesia di mana terdapat dua sistem pendidikan yang berjalan secara paralel namun memiliki orientasi, struktur, dan regulasi yang berbeda. Hal ini tampak pada pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan agama/madrasah, yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Secara etimologis, "dikotomi" berasal dari bahasa Inggris *dichotomy*, yang berarti pembagian menjadi dua bagian atau percabangan menjadi dua. Dalam konteks pendidikan Indonesia, dikotomi secara terminologis dipahami sebagai pemisahan sistem antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Pemisahan ini secara fundamental memisahkan kesadaran keagamaan dari ilmu pengetahuan, menciptakan dua jalur berbeda dalam pengembangan intelektual.

Pemisahan ilmu umum dan ilmu agama telah mengantar dunia pendidikan di Indonesia pada kondisi yang mengkhawatirkan, seperti menghasilkan ilmuwan yang brilian secara teknis namun kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan, serta ahli agama yang mendalam dalam ilmunya

namun kurang peka terhadap kehidupan sosial dan cenderung "buta" di zaman modern. Pola pikir bipolar-dikotomis ini bahkan dapat menyebabkan dehumanisasi dan "split personality" dalam diri muslim, menjadikan individu terasing dari dirinya, keluarga, komunitas, lingkungan, dan denyut nadi sosial-budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dikotomi bukan sekadar inefisiensi pendidikan, melainkan hambatan fundamental dalam pengembangan warga negara yang utuh dan masyarakat yang kohesif serta berlandaskan etika. Pemisahan ini juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kualitas dan status kedua jenis pendidikan tersebut. Zuhairini (2000) menyebutkan bahwa dikotomi pendidikan berpotensi menciptakan ketimpangan mutu dan kesempatan pendidikan. Sementara itu, Tilaar (2004) menegaskan bahwa integrasi antara kedua sistem ini penting untuk menciptakan keadilan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Azyumardi Azra, dikotomi pendidikan di Indonesia adalah warisan kolonial yang mempertentangkan pendidikan sekuler dan pendidikan agama Islam. Pemerintah kolonial Belanda membatasi akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, khususnya pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam termarginalkan dan dianggap inferior dibandingkan pendidikan sekuler. Muh Subhan Ashari menyoroti bahwa setelah kemerdekaan, dikotomi ini berlanjut, sehingga pendidikan Islam masih dianggap kurang penting dibandingkan pendidikan umum. Haidar Putra Daulay juga mengungkapkan bahwa sistem pendidikan kolonial Belanda sengaja dirancang untuk membedakan antara pendidikan kolonial dan pribumi, yang berdampak pada marginalisasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dampak dikotomi ini masih terasa hingga kini, di mana pendidikan umum dan agama dikelola oleh dua kementerian berbeda (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama), menyebabkan perbedaan kurikulum, fasilitas, dan kualitas tenaga pengajar. Untuk mengatasinya, beberapa pakar menyarankan integrasi antara pendidikan umum dan agama agar menghasilkan sistem pendidikan yang holistik.

Sejarah Terbentuknya Dikotomi Pendidikan

Sejak masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan di Indonesia telah dibedakan antara pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Pendidikan Barat dikembangkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial, sementara pendidikan Islam berkembang mandiri di pesantren dan surau. Perbedaan ini berlanjut hingga masa kemerdekaan dan menimbulkan perbedaan dalam pengelolaan, kurikulum, dan kualitas pendidikan. Dualisme dan dikotomi sistem pendidikan ini diakui secara luas sebagai warisan langsung dari zaman kolonial Belanda (Marwan Saridjo, 1996).

Pemerintah kolonial Belanda sengaja menerapkan sistem pendidikan yang terpisah dan diskriminatif untuk kepentingan mereka sendiri. Tujuan utamanya bukan untuk memajukan rakyat pribumi, melainkan untuk membentuk kelas elit yang loyal dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendah atau kasar guna mendukung kepentingan ekonomi dan administrasi kolonial. Mereka menanamkan dualisme dengan adanya sekolah untuk anak Belanda dan untuk anak pribumi (pendidikan Islam), serta sekolah yang memberi kesempatan melanjutkan pelajaran dan yang tidak, secara efektif membatasi mobilitas sosial dan mempertahankan perbedaan sosial.

Kebijakan represif terhadap pendidikan Islam sangat kentara. Pemerintah kolonial membentuk "Priesnterraden " untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam secara ketat, menggunakannya sebagai alat politik untuk menghambat implementasi pendidikan Islam (Suwito, 2004). Ordonansi Guru yang dikeluarkan pada tahun 1905 dan diperbarui pada tahun 1926, mewajibkan guru agama memiliki izin dari pemerintah. Kebijakan ini membatasi siapa yang boleh mengajar ilmu agama dan dianggap kalangan muslim sebagai upaya mengebiri aspirasi mereka. Lebih lanjut, Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie) tahun 1932 bahkan memberikan wewenang untuk memberantas dan menutup madrasah serta sekolah yang beroperasi tanpa izin. Kebijakan-kebijakan ini secara konsisten menunjukkan bahwa dikotomi pendidikan merupakan alat rekayasa sosial dan kontrol politik yang canggih, bertujuan mempertahankan struktur kekuasaan, membatasi mobilitas sosial pribumi, dan mencegah munculnya elit pribumi yang berpotensi memberontak, khususnya dari kalangan Islam.

Periodisasi dikotomi pendidikan di Indonesia

Masa Kolonial Belanda: Pemerintah kolonial membentuk sekolah-sekolah sekuler, sementara pendidikan Islam (pesantren dan madrasah) berkembang mandiri dan tidak diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan formal. Masa Kemerdekaan (1945-1965): Madrasah mulai mendapatkan perhatian, namun belum setara dengan sekolah umum. Pemerintah mengakui madrasah namun belum menyetarakan kurikulum dan sarana. Orde Baru (1966-1998): Pemerintah mulai melakukan modernisasi madrasah dengan memasukkan mata pelajaran umum, upaya awal integrasi kurikulum dimulai, namun tetap ada kesenjangan pengelolaan. Era Reformasi dan Pasca 2000: UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Program bantuan BOS diperluas ke madrasah, meskipun pencairan dan jumlahnya masih berbeda. Terbitnya SKB Tiga Menteri (2006) mengenai pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan.

Isu-Isu Dikotomi Pendidikan

Beberapa isu utama yang muncul akibat dikotomi pendidikan di Indonesia meliputi :

- a. Ketimpangan Dana BOS: Distribusi dan nominal dana BOS untuk sekolah umum dan madrasah belum sepenuhnya setara, menimbulkan kesenjangan operasional.
- b. Akses Teknologi dan Digitalisasi: Sekolah umum lebih dulu terintegrasi dengan sistem digitalisasi pendidikan nasional dibandingkan madrasah yang banyak tertinggal dalam infrastruktur dan pelatihan.
- c. Kesenjangan dalam Sertifikasi dan Kesejahteraan Guru: Guru madrasah, terutama non-PNS, masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan sertifikasi dan tunjangan yang layak.
- d. Polemik Kurikulum Merdeka: Implementasi Kurikulum Merdeka lebih cepat diterapkan di sekolah umum, sementara madrasah menghadapi kendala adaptasi karena beban kurikulum ganda (umum dan agama).
- e. Kesenjangan Kurikulum dan Standar Mutu: Sekolah umum menekankan sains dan teknologi, sementara madrasah lebih banyak memuat materi agama. Upaya integrasi sudah dimulai dengan Kurikulum 2013, namun pelaksanaannya masih belum merata.

- f. Perbedaan Pengelolaan dan Regulasi: Sekolah berada di bawah Kementerian Pendidikan, sementara madrasah di bawah Kementerian Agama, yang menyebabkan dikotomi dalam kebijakan dan anggaran.
- g. Persepsi Masyarakat: Madrasah masih dianggap sebagai alternatif sekunder, bukan pilihan utama, meskipun banyak madrasah unggulan telah menunjukkan prestasi akademik yang kompetitif.
- h. Dikotomi Administratif dan Regulasi: Pengelolaan dua jalur pendidikan oleh dua kementerian yang berbeda menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan lemahnya koordinasi, menghambat implementasi program nasional secara merata (Departemen Agama RI, 2001).
- i. Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata: Terdapat perbedaan mencolok dalam fasilitas, mutu tenaga pengajar, serta akses teknologi antara sekolah umum dan madrasah. Madrasah, terutama di daerah terpencil, seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur dan dana (Abdullah, 2006), yang berdampak pada kualitas lulusan.
- j. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dikotomi ini, seperti menyetarakan ijazah madrasah dengan sekolah umum dan memperluas akses program BOS untuk madrasah. Ada juga integrasi kurikulum di beberapa madrasah unggulan yang mulai menggabungkan sains dan ilmu agama secara proporsional. Namun, tantangan tetap ada dalam hal regulasi, pendanaan, dan persepsi masyarakat (Abdullah, 2006).

Dampak Dikotomi Pendidikan

Dikotomi pendidikan memiliki konsekuensi yang luas, memengaruhi kualitas lulusan, struktur sistem pendidikan, dan dinamika social.

1. Dampak pada Kualitas Lulusan

Kesenjangan Kompetensi dan Diskriminasi Lulusan: Dikotomisasi kurikulum secara langsung menyebabkan dikotomisasi kelulusan, menciptakan label "Islam" dan "non-Islam" terhadap lulusan pendidikan. Lulusan madrasah seringkali mendapat perlakuan diskriminatif karena kemampuan umumnya dianggap belum seimbang atau kurang. Akibatnya, lulusan dari kedua jalur pendidikan seringkali memiliki pemahaman parsial terhadap disiplin ilmu masing-masing, membatasi kontribusi mereka di dunia modern yang menuntut kompetensi holistik.

Produksi Ilmuwan yang Kurang Bertanggung Jawab dan Ahli Agama yang Kurang Peka Sosial: Pemisahan yang tajam antara ilmu umum dan agama menghasilkan ilmuwan yang mungkin brilian secara teknis tetapi kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan. Di sisi lain, ia juga menghasilkan ahli agama yang mungkin sangat mendalam dalam ilmu agamanya tetapi tidak peka terhadap kehidupan sosial dan cenderung "buta" di zaman modern.

Pembentukan "Warga Kelas Dua" dan "Split Personality": Dampak psikologis yang berulang kali disebutkan, yaitu "warga kelas dua" dan "split personality," menunjukkan bahwa dikotomi bukan hanya masalah struktural eksternal, melainkan beban psikologis internal. Individu dipaksa untuk menavigasi dua kerangka pengetahuan dan identitas yang tampaknya bertentangan, yang mengarah pada fragmentasi internal dan rasa keterasingan. Hal ini menyiratkan bahwa sistem pendidikan, alih-alih menumbuhkan

individu yang terintegrasi, secara tidak sengaja berkontribusi pada krisis identitas dan tekanan psikologis, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan secara keseluruhan dan partisipasi sosial.

2. Dampak pada Sistem Pendidikan dan Sosial

Perpecahan Sistem dan Kebijakan yang Tidak Selaras: Perpecahan sistem dan kebijakan yang tidak selaras ini menimbulkan inefisiensi birokrasi dan pemborosan sumber daya yang signifikan. Ketika dua kementerian besar beroperasi dengan kebijakan yang tidak terkoordinasi dan bersaing untuk sumber daya atau perhatian, hal itu menyebabkan duplikasi upaya, kesenjangan dalam penyediaan layanan, dan sistem keseluruhan yang kurang efektif. Ini menyiratkan bahwa dikotomi bukan hanya masalah filosofis tetapi tantangan administratif praktis yang menghabiskan dana publik dan menghambat penyediaan pendidikan yang optimal.

Kesenjangan Pendanaan dan Kesejahteraan Guru: Kesenjangan pendanaan dan kesejahteraan guru secara langsung berkorelasi dengan penurunan kualitas pendidikan di lembaga yang terpinggirkan. Pendanaan yang tidak memadai berarti fasilitas yang tidak memadai, sumber daya yang terbatas, dan ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan guru yang berkualitas. Kesejahteraan guru yang buruk menyebabkan demotivasi, kualitas pengajaran yang lebih rendah, dan tingkat pergantian yang tinggi. Faktor-faktor ini secara langsung menyebabkan penurunan kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga-lembaga ini. Ini menyiratkan bahwa diskriminasi finansial yang berasal dari dikotomi menciptakan lingkaran setan: kualitas yang dianggap lebih rendah menyebabkan pendanaan yang lebih sedikit, yang selanjutnya menurunkan kualitas, memperkuat persepsi negatif dan memperburuk ketidaksetaraan pendidikan secara keseluruhan.

Tantangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Persaingan Lembaga: Tantangan dalam PPDB dan persaingan lembaga menunjukkan persaingan yang tidak sehat dan ketidakadilan akses pendidikan. Sistem dualistik ini mendorong lingkungan persaingan yang tidak sehat daripada kolaborasi. Kurangnya kebijakan yang sinkron untuk penerimaan siswa dan pendirian sekolah menciptakan medan permainan yang tidak merata, di mana beberapa institusi (seringkali madrasah) dirugikan. Ini menyiratkan bahwa dikotomi tidak hanya memfragmentasi sistem tetapi juga menciptakan hambatan sistemik terhadap akses yang adil ke pendidikan berkualitas, karena orang tua dipaksa untuk menavigasi lanskap yang kompleks dan seringkali tidak adil, yang pada akhirnya memengaruhi pendaftaran siswa dan kelangsungan institusi.

Kesenjangan Sosial dan Dehumanisasi: Kesenjangan sosial dan dehumanisasi menunjukkan bahwa dikotomi merupakan faktor pemicu dan pemelihara ketidakadilan sosial. Jika satu jalur pendidikan (agama) secara sistematis kurang didanai dan lulusannya didiskriminasi, hal itu akan memperkuat pembagian kelas dan membatasi mobilitas sosial ke atas bagi segmen masyarakat tertentu. Aspek "dehumanisasi" lebih lanjut menggarisbawahi biaya sosial yang mendalam, menunjukkan bahwa sistem tersebut gagal menumbuhkan potensi dan martabat manusia secara penuh di seluruh segmen populasi. Ini menyiratkan bahwa dikotomi bukan hanya cerminan ketidaksetaraan sosial tetapi secara aktif berkontribusi pada pelestariannya.

Upaya dan Solusi Mengatasi Dikotomi

- a. Beberapa upaya dan solusi untuk mengatasi dikotomi pendidikan meliputi :
- b. Penguatan Integrasi Kurikulum: Pemerintah melalui Kurikulum Merdeka mendorong penggabungan nilai-nilai agama dengan sains. Contoh nyata adalah MAN Insan Cendekia yang mengintegrasikan pelajaran sains dan keagamaan dalam kurikulum berbasis riset.
- c. Peningkatan Anggaran dan Sarana: Alokasi BOS dan DAK diarahkan ke madrasah dengan kebutuhan prioritas. Contohnya, Madrasah Tsanawiyah di Sukoharjo menerima bantuan pembangunan laboratorium tahun 2023 dari APBN.
- d. Penyamaan Status dan Sertifikasi Guru: Pemerintah melalui program PPG (Pendidikan Profesi Guru) memberikan akses yang sama bagi guru madrasah. Guru madrasah swasta di Sragen, misalnya, mulai mengikuti sertifikasi yang diakui setara dengan guru sekolah.
- e. Kampanye Literasi Publik: Sosialisasi melalui media dan tokoh agama penting dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat agar tidak memandang madrasah sebagai pendidikan kelas dua. Contohnya adalah Festival Madrasah se-Solo Raya yang menampilkan prestasi dan inovasi siswa madrasah.
- f. Kolaborasi Lintas Kementerian: Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama perlu menyusun kebijakan bersama tentang standar nasional pendidikan. Contoh: Peluncuran program EMIS-Merdeka untuk menyamakan basis data dan pelaporan madrasah dengan sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dikotomi pendidikan di Indonesia merupakan isu kompleks yang berakar pada warisan kolonial, pergulatan politik Islam dan nasionalisme, serta stagnasi intelektual internal umat. Manifestasinya terlihat jelas dalam pemisahan sistem sekolah umum dan madrasah, dikotomisasi kurikulum, stratifikasi kualitas lembaga pendidikan, dan bahkan fragmentasi identitas individu. Dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, mulai dari kesenjangan kompetensi lulusan, diskriminasi, hingga produksi ilmuwan yang kurang bertanggung jawab dan ahli agama yang kurang peka sosial, yang pada akhirnya berkontribusi pada dehumanisasi dan ketidakadilan sosial. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya regulasi dan penyetaraan sejak pasca-kemerdekaan, dualisme sistem pendidikan masih dipertahankan, seringkali mengarah pada diskriminasi pendanaan dan kesejahteraan guru. Tantangan dalam penerimaan peserta didik baru dan persaingan antarlembaga juga menunjukkan bahwa masalah ini belum sepenuhnya teratasi. Untuk mengatasi dikotomi ini secara fundamental, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Ini mencakup revisi kurikulum yang mengintegrasikan ilmu umum dan agama, pelatihan guru yang komprehensif, peningkatan fasilitas pendidikan, serta kampanye kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat. Integrasi ini bukan hanya tentang menyatukan dua jalur pendidikan, tetapi juga tentang membangun kembali epistemologi pengetahuan yang utuh, di mana ilmu dan agama dipandang sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak

mulia, bertanggung jawab secara sosial, dan mampu menghadapi tantangan global dengan landasan nilai-nilai yang kuat.

Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi dikotomi pendidikan di Indonesia:

Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional, diperlukan standarisasi mutu yang menyeluruh antara sekolah umum dan madrasah, mencakup kurikulum, fasilitas, dan kualitas tenaga pengajar, guna memastikan pemerataan kualitas Pendidikan, masyarakat perlu didorong untuk tidak memandang madrasah sebagai pendidikan kelas dua melalui kampanye literasi publik yang menampilkan prestasi dan inovasi madrasah, evaluasi kebijakan secara periodik penting dilakukan untuk menilai efektivitas integrasi sistem pendidikan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan perlu ada kebijakan afirmatif untuk menutup kesenjangan dalam hal anggaran, infrastruktur, dan kesejahteraan guru antara dua sistem pendidikan, terutama untuk madrasah di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2006). "Islam dan Pendidikan Nasional: Mencari Format Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(1), 1-15.
- Ashari, Muh Subhan. (2015). *Dikotomi Pendidikan Islam: Penyebab dan Solusinya*. Diakses 24 Mei 2025, dari <https://ejournal-bacaka.org/index.php/jpai/article/download/8/2>.
- Azra, Azyumardi. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi. (2002). "Pendidikan Islam: Madrasah, Sekolah, dan Perguruan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-10.
- Basyit, Abd. (2019). *Dikotomi Pendidikan Islam: Penyebab dan Solusinya*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1.
- Departemen Agama RI. (2001). *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hasbullah. (2015). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Historis, Perkembangan, dan Pergulatannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maksum, Ali. (1999). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Marwan Saridjo. (1996). *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amisco.
- Muhaimin. (2006). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Putra Daulay, Haidar, dkk. (2021). *Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. *Jurnal Pendidikan Islam*. Diakses 24 Mei 2025, dari <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/download/66/66/212>.

Suwito. (2004). Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.

Zuhairini. (2000). Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.